



Korespondensi

Email : alisopindimas@gmail.com



Inovbook Publications

Wisma Monex 9th Floor

Jl. Asia Afrika No 133-137 Bandung,
40112



Karya ini dilisensikan di bawah
Lisensi Internasional Creative
Commons Atribusi Nonkomersial
sharelike 4.0.

INOVASI POLITIK : KIPRAH LEGISLATOR PKS DI PARLEMEN KOTA PANGKALPINANG PERIODE 2019-2024

Dimas Ali Sopin^{1*}, Ranto^{2*}

^{1,2} Universitas Bangka Belitung | Gang IV No. 1, Balunijuk,
Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung 33172

Disetujui: 30 Januari 2023

Abstract

Gait in parliament is an important part that does not escape from the sight of political parties's eyes. Cadres as representation from political parties occupying seats in parliament are expected to be able in taking part of realizing people's aspirations, so the administration of regional government becomes more dynamic. The aim of this research were: 1) Analyzing the progress of PKS legislators in Pangkalpinang City's parliament; and, 2) Analyzing the influencing factors of progress from PKS legislator in Pangkalpinang City's parliament. This research was conducted at Prosperous Justice Party (PJP) Parliament, Pangkalpinang City in 2022 using qualitative method through descriptive approach. This research used primary data and secondary data from the chairperson, management, and cadres of Prosperous Justice Party collected through observation, interview, and documentation. The result of this research showed that: 1) Prosperous Justice Party optimizing legislator's work through the faction in DPRD of Pangkalpinang City by strengthening the function in parliament through quantity and quality increasing of cadres in government as evidenced by the increase in seat acquisition from 2 seats in 2014 until 2019 to 3 seats in 2019 until 2024; and, 2) Prosperous Justice Party employs various strategies to realizing aspirations, which are influential factors in gait, including the process of conveying convincing details of aspirations at plenary meetings, negotiating several parties using reciprocal relationships, and periodic internal evaluation. However, the realization of this aspirations faces several obstacle, including budget constraints, and political interest with certain people.

Keywords: Government, Cadre, Legislator's Work, Parliament, Factor

Abstrak

Kiprah dalam parlemen menjadi bagian penting yang tidak luput dari penglihatan partai politik. Kader sebagai utusan dari partai politik yang menduduki kursi parlemen diharapkan mampu berkiprah dalam perealisasi aspirasi masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis kiprah legislator PKS di parlemen Kota Pangkalpinang; dan, 2) Menganalisis faktor yang mempengaruhi kiprah legislator PKS di parlemen Kota Pangkalpinang. Penelitian ini dilakukan di Parlemen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kota Pangkalpinang pada 2022 dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dari Ketua, Pengurus, dan Kader dari Partai Keadlian Sejahtera Kota Pangkal-

pinang yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Partai Keadilan Sejahtera melakukan pengoptimalan kiprah legislator melalui fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang dengan melakukan penguatan fungsi di parlemen melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kader di pemerintahan yang dibuktikan dengan peningkatan perolehan kursi dari 2 kursi pada 2014 sampai 2019 menjadi 3 kursi pada 2019-2024; dan, 2) Partai Keadilan Sejahtera melakukan berbagai strategi untuk merealisasikan aspirasi yang menjadi faktor berpengaruh terhadap kiprah, antara lain proses penyampaian detail aspirasi yang menyakinkan pada rapat paripurna, negosiasi terhadap beberapa partai dengan menggunakan hubungan timbal-balik, dan evaluasi internal secara berkala. Namun, realisasi aspirasi ini menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran dan kepentingan politik dengan orang tertentu.

Kata Kunci: Pemerintah Kiprah Legislator, Kader, Parlemen, Faktor

I. PENDAHULUAN

Partai politik menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem demokrasi negara, terkhusus negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia (Sunarto, 2004:27). Partai politik yang baik merupakan partai politik yang mampu memperjuangkan fungsinya sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, cita-cita, dan nilai yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 2008:403).

Saat ini, setiap partai politik dituntut untuk bertahan dalam percaturan dan permainan politik serta melaksanakan berbagai program dengan tujuan untuk menguatkan kiprah partai politik dalam masyarakat. Partai politik seringkali menjadi wujud ekspresi ide, pikiran, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, maka akan semakin berkualitas sebuah demokrasi. Partai politik

harus selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru demi kemajuan internal partai. Sebagaimana Sururi (2019) yang mengatakan Inovasi dalam sektor publik di Indonesia telah mengubah karakteristik organisasi publik yang rigid, kaku, dan cenderung status-quo menjadi sistem yang lebih luwes dan dinamis. Partai politik menjadi aktor penting dalam percaturan politik dikarenakan banyaknya kepentingan di dalam partai politik yang membuat partai sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan muncul. Sebagaimana Budiardjo (2008, hlm. 405) menyatakan partai politik menjadi tempat bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di depan penguasa.

Para tokoh politik berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi partai politik dapat mewujudkan ruang demokrasi di tengah masyarakat dan tersalurkannya aspirasi publik. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan berbagai dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas di dalam masyarakat. Sumber dari kelemahan partai politik memang sangat beragam, namun belakangan ini terdapat beberapa kelemahan yang menonjol dan cukup memprihatinkan yakni tentang aktualisasi peran partai politik di dalam parlemen.

Partai politik memiliki fungsi yang sangat penting di negara demokrasi, salah satunya adalah fungsi artikulasi politik. Artikulasi politik ini dapat diartikan bahwa partai politik berfungsi untuk menyuarakan atau memperjuangkan aspirasi rakyat yang beragam dan disatukan menjadi kehendak bersama melalui berbagai cara, seperti memberikan dukungan kepada kader partai politik yang kompeten atau individu di luar partai politik yang masih dianggap searah untuk menjadi pejabat di bidang pemerintahan dengan harapan kebijakan-kebijakan umum (*public policy*) yang akan dihasilkan dapat dipengaruhi oleh partai politik yang bersangkutan.

Pascareformasi tahun 1998, terjadi fenomena yang sangat menonjol, yakni munculnya banyak partai baru di antara partai-partai terdahulu yang ikut dalam verifikasi untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 1999 yang membuat iklim politik di Indonesia

penuh dengan persaingan terbuka. Salah satu partai politik yang baru muncul sebagai kontestan pemilihan umum tahun 1999 adalah Partai Keadilan, akan tetapi Partai Keadilan tidak memenuhi aturan syarat minimal perolehan suara sah (*electoral threshold*) sebesar 3% seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 pada pemilihan umum 1999 sehingga untuk dapat mengikuti pemilu 2004 dipersiapkan sebuah partai yang dapat mengakomodasi keinginan Partai Keadilan agar tetap berkontribusi pada perjuangan umat. Tanggal 3 Juli 2003, bergabunglah Partai Keadilan yang secara resmi merubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera, disingkat PKS. Partai Keadilan Sejahtera dipimpin oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A. dengan visi “terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat”. Pemaknaan kata sejahtera berawal dari Visi partai ini sebagai wujud nyata finalisasi perjuangan partai, misalnya melalui kader di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen untuk mempengaruhi kebijakan umum atau mengkritisi kebijakan umum yang tidak menguntungkan rakyat.

Bapennas mencatat pada pemilu 2004, PKS berhasil memperoleh lonjakan suara hingga lebih dari 600%. PKS mendapat suara sebanyak 8.149.457 dengan 45 kursi di DPR. PKS bahkan berhasil menang di DKI Jakarta dan meloloskan presiden partainya saat itu, Dr. Hidayat Nur Wahid dengan perolehan suara sebesar 262.019 melebihi BPP yang hanya sebesar 232.355 dan menempatkannya sebagai anggota DPR 2004-2009 dengan perolehan suara terbanyak, bahkan Hidayat Nur Wahid kemudian memenangkan pemilihan ketua MPR. Lonjakan suara PKS yang sangat besar pada pemilu 2004 tidak lepas dari keberhasilan PKS membangun citra sebagai partai bersih dan peduli sebagaimana jargon mereka. Berbeda dengan kebanyakan partai yang hanya bergiat menjelang Pemilu, PKS mampu menggerakkan kader-kadernya untuk terus memanas mesin partai setiap saat, terutama dalam menggarap aspirasi dan aksi-aksi sosialnya.

Dinamika politik lokal saat ini menuntut setiap anggota legislatif terpilih untuk bekerja lebih keras dibuktikan dengan ekspektasi yang tinggi dari konstituen terhadap kader partai yang terpilih menjadi anggota legislatif serta memberikan inovasi-inovasi baru bagi perkembangan masyarakat seperti yang

dikatakan oleh Yulius (2021) yakni inovasi tentunya harus memiliki dampak positif terhadap lingkungannya terutama masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Ekspektasi yang begitu tinggi ini bukan hanya pandangan sesaat atau tanpa alasan, hal ini dikarenakan sejak tahun 2005 tata cara pemilihan calon legislatif telah mengalami perubahan (dari rekomendasi partai menjadi pemilihan langsung oleh pemilih), keputusan ini tentunya menumbuhkan sistem demokrasi yang benar-benar ditentukan oleh rakyat. Artinya, rakyat memilih secara langsung wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan preferensinya, bukan atas dasar paksaan oleh pihak-pihak lain. Fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislatif merupakan salah satu yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik.

Realitas politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan kandidat terpilih yang menduduki kursi parlemen harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada satupun alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi dari masyarakat, karena waktu, fasilitas bahkan anggaran mereka melakukan tindakan tersebut telah diatur sedemikian rupa. Tidak sedikit muncul kasus di beberapa daerah, masyarakat mengeluh karena anggota DPRD yang mereka pilih sebagai wakil di parlemen kurang akomodatif bahkan tidak pernah berkunjung dan berkomunikasi dengan masyarakat yang memilihnya seolah-olah lupa dari mana mereka berasal, sehingga terkadang masyarakat kehilangan saluran komunikasi politik untuk menyalurkan aspirasi mereka.

Terkadang muncul kasus yang berbeda, anggota DPRD pernah berkunjung dan menyerap aspirasi masyarakat, akan tetapi aspirasi yang mereka sampaikan tidak pernah terealisasikan. Hal ini begitu terlihat ketika seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan/diputuskan oleh pemerintah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Seharusnya dengan menguatnya peran DPRD sebagai posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin

kedaulatan rakyat di era otonomi daerah dapat ditandai dengan ditegaskannya peran tugas dan wewenang DPRD, yakni selain menyerap dan menyalurkan aspirasi juga melakukan fungsi pengawasan.

Parlemen harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus dijadikan prioritas serta bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan parlemen, bukan hanya hasil dari interaksi pemerintah daerah dan parlemennya saja, diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong sistem di parlemen lebih aktif dan aspiratif. Pasal 53 UU 10/2004 telah menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan tanpa memerinci implikasinya bagi pemerintah, karena di dalam penjelasan undang-undang tersebut UU ini menyatakan bahwa teknis penjaminan hak masyarakat ini diatur dalam tata tertib DPRD, sehingga hal ini membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan nantinya.

Pangkalpinang merupakan ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan masyarakatnya dominan beragama islam. Tercatat bersumber dari DKD Kemendagri RI Semester II sejak tahun 2020 penduduk Kota Pangkalpinang yang beragama islam mencapai 182.426 jiwa dari 217.753 jiwa penduduk Kota Pangkalpinang. Sementara itu, PKS dikenal sebagai partai yang menegakkan nilai Islam secara konsisten. Anggota PKS memang heterogen, ada yang NU dan Muhammadiyah. Perbedaan cara pandang islam atau mazhab yang dianut masyarakat Kota Pangkalpinang merupakan tantangan bagi PKS untuk menyatukan budaya yang berbeda dan mengkomunikasikan ideologi masyarakat dalam beragama, sehingga terbentuk kehendak bersama untuk mewujudkan visi sejahtera yang telah dicita-citakan.

Kiprah partai politik di dalam parlemen seharusnya menjadi bagian penting yang tidak luput dari penglihatan semua partai politik. Kiprah ini dapat berupa aktualisasi fungsi dari para kader-kader partai politik yang saat ini menduduki kursi-kursi parlemen. Aktor politik utusan partai yang menduduki kursi parlemen diharapkan mampu memberikan kontribusi

tertinggi dalam menjalankan peran dan fungsi mereka terhadap masyarakat, bukan hanya mementingkan kepentingan partai dan ideologi partai politik saja. Partai politik yang saat ini menduduki DPRD Kota Pangkalpinang sangatlah beragam dengan 30 anggota mulai dari partai Gerindra (4 kursi), PDIP (4 kursi), Golkar (4 kursi), Nasdem (4 kursi), PPP (4 kursi), Demokrat (4 kursi), PKS (3 kursi), PAN (2 kursi) dan PKB (1 kursi).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selalu mendapatkan kursi di parlemen Kota Pangkalpinang, tercatat dari awal pemilihan parlemen di Kota Pangkalpinang sampai dengan pemilihan serentak 2019 kemarin Partai Keadilan Sejahtera terus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dibuktikan dengan perolehan suara yang didapatkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan serentak 2019 membuat PKS mendapatkan 3 kursi di DPRD Kota Pangkalpinang yakni Rio Setiady, S.T., H. Arnadi, S.TP., dan Syahrudin sehingga mereka mampu membentuk fraksi di DPRD Kota Pangkalpinang. Dengan terbentuknya fraksi sendiri, kebebasan dalam mengutarakan pendapat lebih fleksibel. Fungsi dewan di DPRD juga diharapkan lebih maksimal untuk memberikan pengaruh (*influence*) dalam perumusan kebijakan umum dengan harapan visi sejahtera yang diperjuangkan PKS dapat tercapai.

Pelibatan peran serta masyarakat harus dijadikan kebutuhan bersama, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih dinamis dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPRD tentunya harus ditanggapi dengan menyeleksi setiap aspirasi yang diterima, kemudian hasil aspirasi yang diseleksi diusulkan sebagai *public policy* di tingkat daerah. Penerapan *public policy* yang berasal dari aspirasi masyarakat harus tetap diawasi oleh DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat di Pemerintahan Daerah, dan sampai dengan saat ini hanya terdapat beberapa partai politik yang terus eksis bersuara di dalam parlemen kota Pangkalpinang yakni PKS. Walaupun PKS hanya mendapatkan 3 kursi di dalam parlemen, akan tetapi partai ini sering menjadi sorotan publik dengan aksi-aksinya membela masyarakat dan menjadi oposisi dari pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan tidak pro rakyat. Sehingga hal ini membuat masyarakat

bingung dan penasaran di mana fungsi partai-partai lain sebagai wujud representasi dari suara masyarakat Kota Pangkalpinang.

Oleh karena itu, studi dalam penelitian ini akan terfokus melihat kiprah legislator PKS di parlemen Kota Pangkalpinang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Parlemen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlokasi di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2022 menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan kegiatan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas data temuan lapangan mengenai permasalahan penelitian (Yusuf, 2014). Data temuan lapangan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari ketua, pengurus, dan kader dari Partai Keadilan Sejahtera di Parlemen Kota Pangkalpinang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kiprah Legislator PKS di Parlemen Kota Pangkalpinang

Legislator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pembuat undang-undang anggota dewan legislatif. Artinya, legislator adalah orang-orang yang tergabung ke dalam parlemen dengan tujuan sebagai anggota yang membuat undang-undang dan aturan untuk suatu daerah.

Dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera melakukan berbagai cara untuk menguatkan kiprah legislatornya di parlemen Kota Pangkalpinang diantaranya adalah:

1. Penguatan Fungsi

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menguatkan fungsinya sebagai mitra penyambung aspirasi rakyat melalui pengoptimalan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan disetiap komisi. DPRD Kota Pangkalpinang memiliki 3 komisi diantaranya Komisi 1 yang berfokus kedalam bidang pemerintahan, komisi 2 yang berfokus kedalam bidang perekonomian dan keuangan Dan komisi 3 yang berfokus kedalam bidang pembangunan. Partai Keadilan Sejahtera memiliki fraksi sendiri yang terdiri dari 3 orang yakni H. Arnadi, S.TP sebagai ketua

fraksi, Syahrudhahon sebagai wakil ketua fraksi dan Rio Setiady, S.T sebagai anggota fraksi.

Selaras dengan yang disampaikan pada wawancara peneliti dengan Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza yang menyebutkan:

Setiap komisi melakukan tugas dan fungsinya masing-masing seperti komisi 1 yang bertugas dibidang pemerintahan dan komisi-komisi yang lain agar setiap aspirasi yang masuk dan kebijakan yang akan dikeluarkan dapat ditindak dengan cepat (Wawancara 12 September 2022).

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa struktural komisi yang terdapat di DPRD Kota Pangkalpinang tersusun rapi dengan tugas masing-masing sehingga aspirasi yang disuarakan akan tepat sasaran dan lebih cepat terealisasikan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tergabung kedalam setiap komisi yang ada di DPRD Kota Pangkalpinang seperti Rio Setiady di komisi 1, Arnadi di komisi 2 dan Syahrudhahon di komisi 3. DPRD juga dituntut untuk mewedahi serta menjadi jembatan terkuat dalam menyikapi berbagai persoalan di masyarakat karena mereka yang duduk diparlemen saat ini menjadi representasi aspirasi dan tombak utama untuk menyampaikan ke pemerintahan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Oleh karena itu, DPRD menjadi sorotan umum untuk membuat kebijakan-kebijakan pro rakyat dan menampung aspirasi rakyat untuk diperjuangkan dan direalisasikan sehingga masyarakat akan menilai setiap anggota DPRD yang sering menyuarakan aspirasi mereka dan mengedepankan keinginan masyarakat.

2. Teknik Penjaringan Aspirasi

Salah satu bentuk untuk menarik aspirasi adalah dengan melakukan reses ke masyarakat. Hasil-hasil reses yang dilakukan oleh fraksi PKS akan menjadi bahan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, dalam hal ini adalah Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat Kota Pangkalpinang. Dengan adanya tindak lanjut aspirasi yang diakomodir dalam Musrenbang kemudian menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan pada akhirnya ter-anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, oleh karena itu salah satu kewajiban Anggota DPRD dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, searah dengan pelaksanaan otonomi daerah yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reses dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni melakukan secara formal seperti mengundang beberapa aperatur pemerintahan mulai dari desa sampai dengan kelurahan atau dilakukan secara non formal seperti bercerita diwarung kopi ditengah-tengah masyarakat atau duduk bersama sambil bersenda gurau di halaman rumah. Hal senada juga diutarakan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anggota DPRD komisi 3 Fraksi PKS yakni Syahrudahan yang menyebutkan:

“Secara formal akan dilakukannya reses, akan tetapi saya biasanya lebih senang ngobrol langsung dengan masyarakat-masyarakat ketika ngumpul-ngumpul didepan rumah tetangga sehingga biasanya masyarakat akan lebih terbuka disituasi-situasi tersebut, dan karena saya juga aktif dimasjid jadi terkadang masyarakat menyampaikan langsung ke saya, karena saya tinggal didapil saya sehingga memudahkan untuk bergaul dan silaturahmi dengan masyarakat sekitar, karena biasanya masyarakat lebih nyaman menyampaikan aspirasi diruang-ruang nonformal karena bahasa yang digunakan lebih nyaman menggunakan bahasa daerah karena terkadang masyarakat sulit untuk berbicara diruang formal karena sulit mengatur tata bahasa” (Wawancara 16 Agustus 2022).

Pernyataan anggota komisi 3 fraksi PKS tersebut menggambarkan bahwa proses reses yang dilakukan dengan tujuan menyerap dan mendengar aspirasi masyarakat tidak hanya dilakukan diruang-ruang formal melainkan diruang-ruang non formal. Proses reses yang dilakukan

haruslah melihat kultur dan budaya masyarakat agar masyarakat lebih nyaman dalam menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap pemerintah. Hal ini juga disampaikan oleh Yusreza (22) selaku masyarakat Kota Pangkalpinang yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya dewan-dewan itu turun langsung dan berbicara kepada masyarakat, karena terkadang kami gugup untuk bertemu langsung dikantor, jadi kalau sambil berbicara diwarung-warung atau kerumah-rumah lebih enak kita berbicara dan menyampaikan apa yang kita mau” (Wawancara 22 Januari 2023).

Dari pernyataan tersebut, ruang-ruang non formal dapat menjadi solusi yang baik untuk menjaring aspirasi sampai ke akar rumput karena ketika melakukan reses ke wilayah masyarakat yang minim pendidikan cara ini akan jauh lebih efektif karena masyarakat tidak perlu sungkan dan canggung untuk berbicara dan mereka lebih senang ketika para anggota dewan berbicara langsung sambil menikmati kopi didepan teras rumah dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing.

3. Dukungan Partai

Semua partai politik di tuntun untuk melakukan yang terbaik agar konstituen mereka dan masyarakat Kota Pangkalpinang dapat menjalani kehidupan yang baik tanpa adanya kendala yang berarti terutama perihal kebijakan pemerintah dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga butuh pertimbangan yang matang dan cara yang tepat agar kiprah dalam menjalankan fungsinya sebagai lidah masyarakat terus terlihat, seperti yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki cara-cara tertentu agar mereka terus mengenali dan mengetahui berbagai persoalan masyarakat terbaru yakni dengan melakukan reses berkala dan membuat ruang-ruang diskusi di internal fraksi agar aspirasi yang telah tertampung dapat dirembukan bersama dan mencari cara agar terealisasikan. Hal diatas selaras ketika peneliti melakukan wawancara dengan anggota komisi 1 fraksi PKS DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady yang mengatakan:

“Setiap awal bulan pasti memiliki agenda rapat fraksi membahas mengenai isu-isu yang lagi hangat, kemudian jika perlu diputuskan maka akan disepakati bersama serta dukungan dari system kaderisasi partai” (Wawancara 8 Agustus 2022).

Pernyataan diatas menginformasikan bahwa fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang cenderung aktif dalam menyikapi dan melihat permasalahan yang muncul dimasyarakat. Setiap partai politik yang kader-kader nya duduk diparlemen biasanya memiliki cara tersendiri untuk turut membantu para kader-kader mereka yang duduk diparlemen saat ini. Partai PKS menjadi salah satu partai yang memberikan dukungan penuh kepada kader-kader mereka yang duduk diparlemen saat ini. Salah satunya adalah menjadikan sistem kaderisasi yang mereka gunakan menjadi salah satu media untuk menyerap aspirasi, usulan bahkan kritikan terhadap pemerintah atau kebijakan yang ada. Sistem kaderisasi yang mereka terapkan cenderung dapat memudahkan para kader mereka yang duduk diparlemen untuk menangkap aspirasi lebih cepat dibandingkan dengan anggota dewan dari partai-partai yang lain sehingga mereka dapat lebih cepat dalam merespon berbagai permasalahan ataupun isu-isu yang ada dibandingkan dengan anggota dewan yang lain sehingga tidak heran ketika adanya rapat paripurna dan beberapa rapat-rapat yang lain anggota dewan fraksi PKS dapat mengajukan usulan-usulan terbaru bahkan konsep kebijakan terbaru dari hasil reses dan penjangangan aspirasi yang mereka lakukan.

Tabel 1. Penguatan Kiprah Legislator di Parlemen Kota Pangkalpinang

| No. | Kiprah Legislator | Bentuk-Bentuk Kiprah Legislator | Keterangan |
|-----|------------------------------|--|--------------------|
| 1. | Penguatan Fungsi | 1. Optimalisasi Komisi 2. Komunikator Aktif | Berpengaruh |
| 2. | Teknik Penjangangan Aspirasi | 1. Problem Solver 2. Reses Formal 3. Reses Nonformal | Sangat Berpengaruh |
| 3. | Dukungan Partai | 1. Penguatan Internal Fraksi 2. Optimalisasi UPA (Unit Pembinaan Anggota) | Sangat Berpengaruh |

B. Faktor yang Mempengaruhi Kiprah Legislator PKS di Parlemen Kota Pangkalpinang

1. Strategi Realisasi Aspirasi

Strategi dalam menyampaikan aspirasi menjadi salah satu poin penting untuk meyakinkan forum agar aspirasi yang dibawa dan ingin diperjuangkan dapat diterima oleh anggota dewan yang lain. Proses penyampaian aspirasi ketika rapat paripurna digelar haruslah meyakinkan dan detail mulai dari mengapa aspirasi ini penting untuk direalisasikan serta tujuan dari implementasi yang disuarakan karena tidak jarang muncul pro dan kontra dari proses penyampaian aspirasi sehingga butuh perhatian lebih ketika menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi yang diusulkan. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Arnadi ketua Fraksi PKS Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang yang mengatakan:

“Cara memperjuangkan aspirasi yang pro kontra diparlemen yakni dengan cara menghargai aspirasi yang disampaikan oleh anggota dewan yang lain dengan mendukung aspirasi-aspirasi mereka yang baik, in syaa allah aspirasi yang kita ajukan juga akan didukung, selain itu sebelum melakukan rapat umum, terlebih dahulu mencari goals dari aspirasi ini apa bagi masyarakat dan pemerintahan daerah sehingga hal itu bisa disampaikan dan jika memang hal itu baik akan mudah untuk direalisasikan” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Pemaparan ketua Fraksi PKS Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang tersebut memberikan gambaran bahwa setiap aspirasi yang disampaikan oleh para anggota DPRD harus didukung jika aspirasi tersebut memberikan dampak baik bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang. Setiap aspirasi yang disampaikan tentunya harus jelas tujuan dan arah dari apa yang disampaikan karena tidak jarang ketika aspirasi tersebut disampaikan dan tidak didiskusikan didalam internal fraksi sebelum melakukan musyawaran terdapat beberapa kekeliruan dan aspirasi yang disampaikan tidak jelas arah dan tujuannya

sehingga aspirasi seperti ini tidak dapat direalisasikan dan membawa dampak kurang baik terhadap fraksi yang mengutarakan aspirasi tersebut.

2. Mengatasi Kendala

Beberapa aspirasi tidak jarang memiliki kendala untuk direalisasikan bahkan tidak menutup kemungkinan tidak teralisasi. Salah satu kendala aspirasi sulit untuk direalisasikan yakni permasalahan anggaran. Penyerapan aspirasi masyarakat kedalam anggaran terutama yang masuk kedalam anggaran tahunan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena sering kali anggaran menjadi suatu aspek yang krusial dalam mengimplementasikan setiap keinginan masyarakat. Anggaran yang disediakan oleh DPRD Kota Pangkalpinang dalam mengimplementasikan aspirasi sering kali memiliki masalah. Pertama, terkait dengan keterbatasan anggaran yang dikeluarkan dan anggaran yang dimiliki sehingga butuh teknik penganggaran yang baik karena jika tidak dianggarkan dengan baik maka anggaran yang ada akan mengalami kebobolan. Hal ini yang akan menyebabkan berbagai aspirasi yang diajukan masyarakat tidak masuk kedalam penganggaran. Kedua, terkait dengan kepentingan politik yang membuat *bergaining* tertentu dengan beberapa orang. Misalkan terdapatnya lobby yang dilakukan oleh anggota legislatif untuk menyetujui beberapa kegiatan tertentu di dapil-dapil yang mendukungnya ketika pemilu dilaksanakan dan hal ini akan menguntungkan bagi politisi legislatif tersebut. Ketiga, terkait dengan kualitas usulan karena sering kali terdapat jarak yang jauh antara kebutuhan dan keinginan dalam hal penganggaran pembangunan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Fraksi PKS Komisi 2 DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi yang menyebutkan:

“Kalau aspirasi yang kontra dimasyarakat biasanya terkait dengan lahan mengenai perizinan dari lahan yang akan dibangun seperti ada satu rt yang ingin membangun jalan akan tetapi ada satu orang yang tidak mau karena lahanya masuk kedalam proses pembangunan, maka akan dilakukan

pendekatan secara kekeluargaan dengan berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan, akan tetapi jika masyarakat tetap menolak maka saya akan lepas tangan karena hak lahan tersebut adalah hak pribadi sehingga tidak boleh adanya pemaksaan” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Pernyataan diatas menjadi salah satu bukti adanya perbedaan dari kebutuhan akan pembangunan yang dilakukan dengan keinginan masyarakat sehingga hal ini sering kali menjadi permasalahan untuk dilakukannya anggaran pembangunan di lokasi yang tidak diinginkan masyarakat akan tetapi strategis untuk pembangunan daerah. Selain dari permasalahan anggaran beberapa aspirasi tidak terealisasikan dan tidak adanya tindak lanjut karena proses penjangkaran aspirasi ataupun proses reses yang dilakukan hanya sebatas formalitas. Pelaksanaan Reses atau pertemuan anggota dewan dengan konstituennya juga tercantum dalam Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 234 point (i) tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta pada point (j) yang berbunyi menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Hal ini menjadi patokan kuat bahwa setiap reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Pangkalpinang harus ditindaklanjuti sehingga jika reses dilakukan hanya sebatas formalitas maka DPRD Kota Pangkalpinang telah melanggar amanah dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2014.

3. Evaluasi

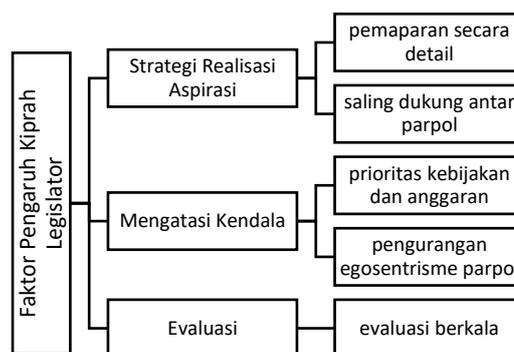
Disisi lain kiprah seorang legislator dapat juga didorong dengan adanya evaluasi yang dilakukan oleh partai politik terhadap kader-kader mereka yang duduk diparlemen saat ini. Seperti yang dilakukan oleh PKS yang melakukan evaluasi rutin terhadap kader-kader mereka di parlemen. Selaras dengan wawancara yang dilakukan

oleh peneliti dengan ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang Muhamad yang mengatakan:

“Evaluasi itu tetap ada dan yang mengurusnya ada bidangnya di dpd ini dan yang mengurusnya dibidang hukum, ketenagakerjaan dan kebijakan public yang mengurus masalah anggota dewan ini, dan kita tidak mengontrol ketat mereka, kita memberikan kebebasan akan tetapi kebebasan itu kebebasan yang bertanggung jawab, akan tetapi yang krusial bisa langsung dikoordinasikan kekita sehingga kita bisa menyampaikan kemasyarakat karena keputusan final tetap disini juga dirapat dewan pimpinan daerah kalau ada masalah bahkan jika masalahnya terlalu berat bisa kita dropout, tapi alhamdulillah belum ada sejarahnya seperti itu dan evaluasi menjadi sarana kita untuk meningkatkan kinerja para anggota kita yang diparlemen” (Wawancara 12 September 2022).

Pernyataan ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang tersebut membuktikan bahwa salah satu indikator dari eksisnya anggota dewan fraksi PKS dalam menanggapi dan menjalankan fungsinya diparlemen adalah dengan adanya evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh partai politik tanpa menekan dan membebankan para kader mereka diparlemen. Evaluasi ini bertujuan agar kader mereka yang ada diparlemen terus meningkatkan kinerja dan basis aspirasi yang ada dimasyarakat untuk diperjuangkan dan diaspirasikan ke forum DPRD. Tentunya sejauh ini kinerja menjadi aspek pendukung eksisnya fraksi PKS dalam menanggapi setiap permasalahan dan aspirasi yang muncul dengan harapan ketika evaluasi ini dilakukan secara berkala kinerja dan efektivitas dari anggota dewan fraksi PKS akan meningkat disetiap waktu.

Adapun faktor pengaruh kiprah legislator Partai Keadilan Sejahtera di parlemen Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Faktor pengaruh kiprah legislator PKS Kota Pangkalpinang

Sumber : Wawancara dan Observasi Peneliti Tahun 2022

Gambar diatas menerangkan bahwa pengaruh kiprah legislator Partai Keadilan Sejahtera dapat dikategorikan kedalam tiga faktor yakni faktor strategi realisasi aspirasi yang didalamnya terdapat pemaparan aspirasi secara detail serta adanya dukungan atau saling dukung dari setiap partai politik dalam upaya merealisasikan aspirasi yang diperjuangkan. Faktor kedua yakni upaya mengatasi kendala yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dalam wujud melakukan prioritas kebijakan dan anggaran serta pengurangan egosentrisme partai politik dan faktor yang terakhir yakni melakukan evaluasi berkala dengan harapan dapat meningkatkan kinerja serta kreatifitas setiap anggota parlemen dalam membuat program yang menjamin kesejahteraan masyarakat.

C. Parlemen Kota Pangkalpinang

Ekonomic Et Societie karya Marx Weber menyatakan partai politik merupakan organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menjadi kendaraan yang sangat penting untuk mendapatkan kekuasaan didalam pemerintahan terutama untuk menyalurkan gagasan serta idealisme dari masing-masing partai. Partai politik dituntut untuk memaksimalkan dan menjadi jembatan penghubung utama aspirasi yang diinginkan masyarakat dengan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan. Seiring perkembangan zaman partai politik diharuskan untuk melakukan berbagai penyesuaian dengan kultur masyarakat terutama masyarakat Kota Pangkalpinang.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang, Muhamad yang menyebutkan:

“Partai politik menjadi tempat bagi setiap masyarakat khususnya masyarakat Kota Pangkalpinang untuk berkumpul dan menyampaikan keinginan mereka, sehingga setiap warga negara mendapatkan hak yang sama yakni untuk menyampikan ide dan gagasan mereka ke pemerintahan” (Wawancara 12 September 2022).

Berdasarkan hal tersebut, partai politik menjadi ruang khusus bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan keinginan bahkan gagasan mereka didalam ruang-ruang publik seperti didalam parlemen. Setiap partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi di parlemen dengan melakukan berbagai cara mulai dari gerakan sosial media, meningkatkan kuantitas kader didalam partai bahkan berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh partai politik tidak luput disusupi oleh dalih-dalih pencitraan agar mendapatkan perhatian masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya kader-kader dari partai politik yang masuk dan lolos didalam pemilihan umum untuk menduduki kursi parlemen dapat menjalankan fungsi mereka sebagai lembaga legislatif dengan maksimal. Seperti yang terjadi didalam Partai Keadilan Sejahtera dimana mereka dituntut oleh konstituen untuk bekerja dan menyampaikan aspirasi secara optimal dan terarah agar tidak adanya penyelewengan kekuasaan dan lupa diri terhadap berbagai impian yang mereka tawarkan pada saat pemilihan umum.

Fungsi partai politik didalam parlemen menjadi bagian yang sangat penting untuk melihat sejauh mana partai dan kader mereka yang duduk diparlemen dapat eksis dan professional dengan tugas dan fungsi mereka dan hal ini juga akan dianalisis dengan menggunakan teori fungsi partai politik oleh Dalton dan Wattenberg (2000) dengan memfokuskan kedalam fungsi partai politik di pemerintahan yang terbagi kedalam 7 indikator yakni:

1. Menciptakan Mayoritas Pemerintahan

Pada indikator ini, Partai Keadilan Sejahtera terus melakukan peningkatan kualitas kader-kader mereka dan merancang berbagai cara agar

memenangkan serta meningkatkan jumlah kader-kader mereka yang duduk diparlemen saat ini. Jumlah kader yang duduk diparlemen sangat mempengaruhi besarnya kiprah yang didapatkan karena semakin banyak kader yang ada diparlemen maka akan semakin besar aspirasi yang disampaikan akan terealisasikan. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada muhamad selaku ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang yang mengatakan:

“Kami terus meningkatkan kualitas para kader agar ketika mereka menjadi anggota dewan mereka bisa memberi manfaat yang besar sehingga masyarakat bisa menilai setiap anggota dewan dan partai politik yang terus memperjuangkan kesejahteraan mereka dan hal ini membawa dampak baik bagi partai politik menuju pemilu berikutnya” (Wawancara 12 September 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas, Partai Keadilan Sejahtera melalui fraksi mereka di parlemen Kota Pangkalpinang terus mengoptimalkan kinerja dan fungsi mereka sebagai lembaga penyalur lidah rakyat. Karakteristik masyarakat yang cenderung melihat aksi nyata dibandingkan sekedar gagasan akan membawa dampak besar bagi partai-partai yang terus muncul dihadapan publik untuk meraih perolehan suara yang besar pada saat pemilu berlangsung. Hal ini yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dan terbukti dari hasil perbandingan perolehan jumlah kursi di parlemen tahun 2014-2019 dan 2019-2024 bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengalami peningkatan perolehan kursi dari periode sebelumnya sebanyak dua kursi dari satu kursi pada periode 2014-2019 menjadi tiga kursi pada periode 2019-2024.

2. Pengorganisasian Pemerintahan

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintahan No.16 Tahun 2010, DPRD memiliki fungsi legislasi yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam kebijakan membentuk peraturan daerah, fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam kebijakan yang menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan pemerintahan daerah dan fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD yang

diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah daerah, terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan oleh Partai Keadila Sejahtera melalui fraksinya di DPRD Kota Pangkalpinang yang terdiri dari 3 orang yakni Arnadi, Rio Setiady dan Syahrudhoh terbagi kedalam komisi yang berbeda-beda diantaranya Arnadi tergabung kedalam komisi 2, Rio Setiady komisi 1 dan Syahrudhoh komisi 3. Selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Arnadi ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Pangkalpinang yang mengatakan:

“Kami menjalankan tugas dan fungsi kami secara maksimal agar fungsi kami sebagai DPRD seperti dalam undang-undang dapat berjalan dengan baik, karena kita paham betul apa saja tanggung jawab kita terhadap masyarakat” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Pangkalpinang menjalankan fungsi dan tugas mereka secara optimal sesuai dengan amanah undang-undang serta konstitusi yang berlaku.

3. Implementasi Tuntutan Kebijakan

Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditujukan untuk menarik aspirasi sampai ke akar-akarnya agar tidak adanya ketimpangan dan kesenjangan yang muncul dari kebijakan publik yang akan dikeluarkan. Partai Keadilan Sejahtera melakukan berbagai tindakan untuk mengumpulkan setiap aspirasi dari masyarakat dengan berbagai cara diantaranya melakukan reses yang dilakukan dengan dua cara yakni reses yang dilakukan secara formal dan reses yang dilakukan secara non formal. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan anggota dewan fraksi PKS Syahrudhoh yang mengatakan :

“Masyarakat kita ini lebih suka diajak ngobrol diruang-ruang non formal seperti depan rumah, diwarung karena

mereka tidak harus berpakaian rapi, tidak harus menggunakan bahasa formal sehingga menurut mereka lebih nyaman seperti itu, dan terkadang ruang-ruang seperti itu lebih efektif bagi kita untuk melihat apa saja yang mereka inginkan dan apa saja yang harus diperbaiki dari kebijakan atau infrastruktur yang sudah ada” (Wawancara 16 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Pangkalpinang melakukan berbagai cara agar aspirasi yang tidak tertampung dalam ruang-ruang formal dapat ditarik sehingga aspirasi yang dikumpulkan akan lebih optimal untuk didiskusikan pada rapat paripurna DPRD. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh partai lain yang hanya melakukan reses berkala seperti partai Golkar dan beberapa partai lainnya sehingga aspirasi yang didapatkan hanya melalui reses serta kunjungan yang dilakukan partai ke setiap dapil di Kota Pangkalpinang.

4. Mengorganisasikan Ketidaksepatan Oposisi

Dalam aspek pemerintahan keberadaan pihak oposisi menjadi hal yang wajar terutama didalam sistem demokrasi. Berbagai aspirasi yang dikumpulkan oleh setiap anggota dewan tidak lepas dari adanya pertentangan untuk merealisasikan aspirasi tersebut terutama perihal prioritas terkait aspirasi mana yang harus direalisasikan terlebih dahulu. Hal serupa terjadi di setiap rapat paripurna yang dilakukan oleh DPRD Kota Pangkalpinang ketika fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Raperda Mihol (Minuman beralkohol). Partai Keadilan Sejahtera menolak adanya raperda mihol dikarenakan bertentangan dengan syariat islam dan ideologi partai dan raperda akan membawa dampak buruk jika disahkan. Hal serupa seperti yang dikatakan oleh ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Arnadi yang mengatakan:

“rancangan peraturan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat pasti akan kami lawan, terutama raperda yang kami rasa membawa dampak buruk bagi masyarakat tentunya kami akan

berusaha untuk menolak hal itu” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas Partai Keadilan Sejahtera berusaha untuk meyakinkan setiap anggota dewan yang berada di parlemen untuk menganalisis terlebih dahulu berbagai raperda yang memiliki dampak buruk untuk direalisasikan. Pengorganisasian oposisi menjadi salah satu cara agar berbagai aspirasi dengan prioritas dapat mensejahterakan masyarakat dan membawa dampak baik bagi masyarakat dapat didahulukan serta mencegah berbagai aspirasi dengan kemungkinan berdampak buruk.

5. Memastikan Tanggung Jawab Tindakan Pemerintah

Sebagai lembaga pemerintahan, pemerintah Kota Pangkalpinang seharusnya menjadi lembaga utama dalam upaya mensejahterakan masyarakat Kota Pangkalpinang, mulai dari kebutuhan bahkan tata kelola yang dijalankan oleh pemerintahan sehingga ketika terlihat sesuatu yang mengganjal akan mudah sekali terlihat oleh publik. Seperti APBD tahun 2023 yang mendapat kritikan langsung dari ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang yang melayangkan 5 catatan khusus kepada pemerintahan Kota Pangkalpinang terkait penggunaan anggaran untuk skala prioritas pada tahun 2023. Hal serupa disampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada arnadi ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mengatakan:

“Saya juga mengkritisi beberapa kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif di Kota Pangkalpinang mulai dari anggaran, peraturan dan lain-lain, seperti permasalahan anggaran daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal dan tau mengenai skala prioritas atas anggaran tersebut, misalnya dengan jumlah anggaran segini hal apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sehingga ada skala prioritas dari penggunaan anggaran tersebut” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas arnadi selaku ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan kritikan terkait dengan pengelolaan skala prioritas APBD Tahun 2023 Kota Pangkalpinang sehingga adanya pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Tidak hanya itu, setiap anggota dewan harus bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan dan aturan yang mereka keluarkan karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Pangkalpinang akan berdampak luas terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pembahasan mengenai aturan yang akan dipatuhi oleh masyarakat harus diperbincangkan dan dipersiapkan secara serius. Sampai dengan saat ini, DPRD Kota Pangkalpinang terus aktif mengawal keinginan dan kebutuhan masyarakat agar munculnya stabilitas ekonomi dan pemerintahan yang menjadi faktor utama perkembangan masyarakat dan pemerintahan Kota Pangkalpinang.

6. Kontrol Administrasi Terhadap Pemerintahan

Pengontrolan administrasi menjadi salah satu hal yang penting untuk memastikan tidak adanya penyelewengan kekuasaan dan sistem di pemerintahan. Pengontrolan administrasi juga bertujuan agar adanya efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu partai yang berfokus terhadap pengontrolan efektivitas pelayan publik yakni dengan mengawasi jalannya sistem pemerintahan mulai dari penyerapan aspirasi dan sejauh mana aspirasi dapat direalisasikan. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Rio Setiady anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Pangkalpinang yang mengatakan:

“kami selalu terbuka kepada siapapun masyarakat yang ingin mengajukan proposal, berdiskusi dengan kami bahkan ruangan kami ini setiap hari selalu ada saja masyarakat yang kesini, mulai dari memberikan saran, mengajukan proposal pembangunan, proposal perahu dan lain-lain sehingga

dengan ini kami harap masyarakat tidak perlu takut dan segan untuk datang ke DPRD dan tidak perlu takut kalau proposal mereka ditolak, karena kami selalu menerima proposal yang masuk dan mendiskusikannya pada saat rapat” (Wawancara 8 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas, DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat harus terbuka dan memudahkan masyarakat agar efektivitas pelayan publik dapat berjalan dengan baik dan isu yang berkembang dikalangan masyarakat kalau sulitnya mengajukan ke lembaga legislatif dapat dipecahkan karena dalam undang-undang salah satu tujuan adanya dewan perwakilan daerah adalah agar masyarakat lebih dekat dan efektif untuk menyuarakan saran dan kritikan mereka terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

7. Memperkuat Stabilitas Pemerintahan

Partai Keadilan Sejahtera melalui fraksinya di DPRD Kota Pangkalpinang ikut serta dalam mengontrol dan meningkatkan stabilitas di pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Arnadi ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mengatakan:

“Pemerintahan Kota Pangkalpinang harus kuat dalam menekan perekonomian masyarakat agar lebih stabil, selain itu kami DPRD juga harus menjalankan fungsi kami secara optimal agar peran kami sebagai penyambung aspirasi masyarakat dapat berjalan dengan optimal dan kami juga ikut dalam mengontrol alur pemerintahan baik di eksekutif maupun di dalam DPRD sendiri” (Wawancara 18 Agustus 2022).

Berdasarkan pernyataan diatas Partai Keadilan Sejahtera berharap agar setiap pemerintahan dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara optimal agar stabilitas pemerintahan di Kota Pangkalpinang baik eksekutif maupun legislatif dapat berjalan dengan baik. Lembaga pemerintahan menjadi aspek terpenting dalam menjaga stabilitas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena lembaga pemerintahan yang bertugas membuat

kebijakan bahkan program yang membawa dampak besar bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi dan pemantaun ulang kinerja dari masing-masing lembaga haruslah selalu dilakukan agar adanya peningkatan kinerja serta bahan pertimbangan untuk membentuk kebijakan dan program agar lebih pro rakyat dan membawa strategi-strategi baru untuk meningkatkan kiprah setiap legislator partai politik dalam menanggapi berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Adapun mengenai bentuk-bentuk fungsi partai politik yang dilakukan oleh legislator Partai Keadilan Sejahtera dalam menjalankan kiprahnya di parlemen Kota Pangkalpinang periode 2019-2024, peneliti mencoba merangkum dan menguraikan secara rinci kedalam bentuk tabel terkait dengan indikator fungsi partai politik yang dilakukan oleh legislator Partai Keadilan Sejahtera di parlemen yakni:



Gambar 2. Indikator fungsi partai politik didalam pemerintahan Kota Pangkalpinang
Sumber : Wawancara dan Observasi Peneliti Tahun 2022

Pada tabel diatas, dapat dianalisis berbagai indikator untuk melihat kiprah legislator Partai Keadilan Sejahtera melalui fungsi partai politik di parlemen Kota Pangkalpinang. Setiap indikator memiliki karakteristik berbeda yang akan menunjang legislator Partai Keadilan Sejahtera di dalam parlemen Kota Pangkalpinang.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kiprah legislator Partai Keadilan Sejahtera tidak terlepas dari penguatan fungsi partai politik di parlemen melalui tindakan yang dilakukan oleh para kader yang duduk di DPRD Kota Pangkalpinang saat ini.

Partai Keadilan Sejahtera melalui fraksinya melakukan pengoptimalan kiprah legislator di DPRD Kota Pangkalpinang dengan menguatkan fungsi di parlemen, yakni Partai

Keadilan Sejahtera menciptakan mayoritas pemerintahan. Partai Keadilan Sejahtera terus melakukan peningkatan kualitas kader-kadernya melalui perancangan berbagai cara agar kadernya dapat memenangkan pemilihan umum, di mana dampak dari kemenangan di pemilihan umum ini akan meningkatkan jumlah kader yang menduduki kursi parlemen. Hal ini dibuktikan oleh peningkatan perolehan kursi dari 2 kursi pada periode 2014 sampai 2019 menjadi 3 kursi pada 2019 sampai 2024. Penguatan fungsi di parlemen tidak hanya meningkatkan jumlah kursi melainkan menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga legislatif secara optimal. Partai Keadilan Sejahtera memiliki fraksi sendiri yang terdiri dari 3 orang yakni H. Arnadi, S.TP sebagai ketua fraksi di komisi 2, Syahrudahon sebagai wakil ketua fraksi di komisi 3, serta Rio Setiady, S.T sebagai anggota fraksi di komisi 1.

Partai Keadilan Sejahtera melakukan berbagai strategi untuk merealisasikan aspirasi yang menjadi faktor berpengaruh terhadap kiprah legislator, antara lain proses penyampaian aspirasi pada rapat paripurna haruslah meyakinkan audiens. Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara mendetail dimulai dari alasan tentang nilai penting aspirasi untuk realisasi sampai tujuan dari implementasi dengan pertimbangan pro dan kontra.

Selain itu fraksi Partai Keadilan Sejahtera melakukan negosiasi terhadap beberapa partai agar aspirasi yang dibawa dapat terealisasi dengan menggunakan hubungan timbal balik yakni mendukung beberapa aspirasi yang membawa dampak baik dari beberapa partai lain sehingga besar kemungkinan partai tersebut akan mendukung aspirasi yang disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Upaya merealisasikan aspirasi tidak lepas dari berbagai kendala yang muncul Anggaran yang disediakan oleh DPRD Kota Pangkalpinang dalam mengimplementasikan aspirasi sering kali memiliki masalah, antara lain keterbatasan anggaran, kepentingan politik terkait penawaran dengan pihak tertentu, dan kualitas usulan yang berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan. Peneliti memberikan masukan serta saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih terfokus terhadap dampak implementasi yang dirasakan oleh masyarakat dari setiap program yang dilakukan oleh anggota parlemen sehingga akan terlihat indeks

keberhasilan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh DPRD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian, khususnya dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pendamping di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kritik dan saran bagi peneliti.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A. B. Barrul Fuad. 2000. *DPRD dalam Masa Transisi menuju Demokrasi*. Jurnal Administrasi Negara: Vol. 1. No. 1.
- Adianto dan Hasim As'ari. 2016. *Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Pekanbaru.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cora Elly Noviati. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/108628-ID-demokrasi-dan-sistem-pemerintahan.pdf> diakses tanggal 28 Maret 2022.
- Christian, Yulius. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Inovatif dalam Mendukung Kemajuan Daerah Perkotaan*. Jurnal Studi Inovasi, Vol. 1 No. 1 (2021): 52-61.
- Dalton, R.J. dan Wattenberg, M.P. 2000. *Partisan Change and Democratic Process*. Washington, DC: CQ Press.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), cet,ke-1.
- Kurniawan. 2014. *Peran Partai Keadilan Sejahtera dalam Pembangunan Politik Studi terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kehidupan Berdemokrasi di Kota Makassar*. Makassar.
- Littlejohn. 2009. *Teori Komunikasi, edisi 9*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial : Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J, 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mumu Mukhlisin. *SUARA KAMPUS .COM* Jatinangor, April 2002 Jawa Barat

- ibnusalam@lycos.com ASM.Romli, 2009).www.romeltea.com) diakses tanggal 28 Maret 2022.
- Nimmo, Daan. 2004. Komunikasi Politik (komunikator, pesan, dan media). Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartatie, 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Rahman, Bustami dan Ibrahim. 2009. *Kisi-kisi Praktis Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Rohmah, Shoma Fajar. 2011. *Aktualisasi Visi Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kudus*. Semarang.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik diterjemahkan oleh Kartini Kartono*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saldi, Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sastroadmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang; IKIP Semarang Press.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Semarang.
- Sururi, A. (2019). *Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata (Studi pada Kawasan Ekowisata Situterate Desa Situterate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang)*. Jurnal Administrative Reform, 6(3), 110.
<https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1905>
- Suwanda, Dadang. 2017. *Peran Pengawasan DPRD*. Bandung:PT Remaja Rodakarya.
- Wasistiono, Sadu. 2009. *Meningatkan Kinerja DPRD*. Bandung:Fokusmedia.
- Widjaja, A.W. 1993. *Komunikasi : komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Yusuf, A. Muri, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.